

**NOTULENSI HASIL DISKUSI KELOMPOK 11**  
**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**  
**KELAS B**

---

Hari, Tanggal	: Rabu, 06 November 2025
Tempat Diskusi	: Google Meet
Waktu Diskusi	: 13.10 - Selesai
Topik Pembahasan	: <b><i>Value for Money Audit</i></b>
Penyaji	: 1. Adea Aprilia (2313031034) 2. Fajriyatur Rohmah (2213031048)
Moderator	: Eri Zenta Zikra B. P (2313031040)
Jumlah Peserta	: 25
Dosen Pengampu	: 1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A. 3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.

---

---

### **URAIAN PELAKSANAAN PRESENTASI**

Presentasi berjalan lancar selama 20 menit, pada pukul 13.10 sampai dengan 13.30 WIB, secara daring melalui G-Meet. Diawali dengan pembukaan, penyampaian materi dari penyaji, sesi diskusi, masukan dari dosen dan penutup. Presentasi berjalan dengan lancar, aman, dan sangat kondusif.

### **SESI DISKUSI**

1. Fatria Irawan (2313031036)

**Pertanyaan:**

Dalam makalah disebutkan bahwa Value for Money Audit menggunakan prinsip 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness). Menurut kalian, prinsip mana yang paling sulit diterapkan dalam instansi pemerintah dan mengapa?

**Jawaban:**

Prinsip efektivitas adalah yang paling sulit diterapkan karena keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya bergantung pada pelaksanaan internal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti akurasi data penerima, kondisi sosial ekonomi, dan koordinasi

lintas instansi. Selain itu, banyak program memiliki tujuan yang tidak terukur secara jelas, sehingga auditor kesulitan menilai apakah hasil dan dampaknya benar-benar tercapai. Akibatnya, penilaian efektivitas menjadi lebih kompleks dibandingkan ekonomi dan efisiensi.

2. Adella Putri Rizkia (2313031044)

**Pertanyaan:**

Jika sebuah program pemerintah telah berjalan sesuai anggaran namun tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat, apakah itu berarti program tersebut gagal secara Value for Money? Mengapa?

**Jawaban:**

Ya, program tersebut dapat dianggap gagal secara Value for Money.

Meskipun anggaran digunakan sesuai rencana, Value for Money menilai bukan hanya kepatuhan pada anggaran, tetapi juga manfaat (efektivitas) yang diterima masyarakat. Jika dampaknya kecil atau tidak signifikan, maka program tidak memberikan “nilai” yang setara dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi.

**MENJAWAB STUDI KASUS:**

1. Fatria Irawan (2313031036)

1. Program BPAD belum memenuhi prinsip ekonomi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa harga pembelian sembako lebih tinggi 20–30% dibandingkan harga pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperoleh barang dengan biaya terendah yang wajar. Selain itu, ketidaksesuaian harga ini mengindikasikan proses pengadaan tidak kompetitif atau kurang transparan, sehingga tidak memenuhi unsur penghematan biaya.
2. Program ini tidak efisien karena hubungan antara input (anggaran) dan output (jumlah penerima bantuan) tidak optimal. Dari anggaran Rp12 miliar hanya terserap Rp9,5 miliar, namun jumlah penerima yang terlayani hanya 10.200 KPM, jauh dari target 15.000 KPM. Artinya, anggaran yang cukup besar tidak menghasilkan output yang sebanding. Selain itu, distribusi yang terlambat hingga 10 hari juga menunjukkan bahwa proses kerja tidak dilakukan dengan cepat dan tepat.

3. Program ini belum efektif karena tidak mencapai sasaran yang direncanakan. Target 15.000 KPM tidak terpenuhi, dan hanya 58% penerima bantuan yang merasa program bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat belum benar-benar tercapai. Efektivitas juga rendah karena data penerima tidak diperbarui, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.
4. Temuan yang dapat diidentifikasi antara lain:
  - Pembelian sembako lebih mahal 20–30% dari harga pasar → tidak ekonomis.
  - Jumlah penerima hanya 10.200 KPM dari target 15.000 KPM → tidak efisien dan tidak efektif.
  - Distribusi terlambat hingga 10 hari di beberapa kecamatan → proses kerja tidak efisien.
  - Data penerima manfaat tidak diperbarui selama dua tahun → menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
  - Tingkat kepuasan penerima hanya 58% → efektivitas program rendah.
5. Melakukan perbaikan dalam proses pengadaan agar harga pembelian sembako lebih sesuai pasar, misalnya melalui e-procurement atau pelelangan terbuka untuk meningkatkan ekonomi pengeluaran.

Memperbaiki mekanisme pendistribusian dengan memperjelas jadwal, menambah petugas, atau menggunakan sistem logistik terpusat agar proses lebih efisien dan tepat waktu.

Memperbarui data penerima bantuan secara berkala serta memperbaiki seleksi KPM untuk memastikan bantuan tepat sasaran sehingga meningkatkan efektivitas program.